

Petrus Selestinus: Gagalnya Proyek Pembangunan Air Bersih Wei Lain Dipastikan Telah Memenuhi Unsur Tindak Pidana Korupsi



Kupang, mwartapedia.com – Tanggung jawab pidana atas gagalnya perencanaan proyek pembangunan sarana air bersih Wei Lain, Kecamatan Omesuri, Kabupaten Lembata, yang diakibatkan oleh penyalahgunaan APBD sebesar Rp. 20.5 miliar, yang mengakibatkan proyek gagal dikerjakan, dipastikan telah memenuhi unsur tindak pidana korupsi.

Hal ini disampaikan oleh Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) dan Advokat Peradi, Petrus Selestinus, S.H saat dihubungi tim media mwartapedia.com pada Sabtu (20/11/2021).

Petrus Selestinus kepada media ini mengatakan bahwa gagalnya proyek pembangunan air bersih Wei Lain yang meresahkan masyarakat dapat direspon oleh Aparat Penegak Hukum.

“Masalahnya sekarang bagaimana politikal wil Aparat Penegak Hukum (APH) merespons keresahan masyarakat Wei Lain, Omesuri,

karena penderitaan dari kekuarangan air semakin tidak pasti kapan berakhir dan uang Rp. 20,5 miliar raup kemana tidak jelas siapa yang harus bertanggung jawab,"ungkapnya.

Pakar hukum Pidana ini menambahkan Kejaksaan Negeri Lembata dan Polres Lembata harus berkoordinasi agar segera mengungkap dugaan korupsi dimaksud siapapun yang terlibat.

"Sekarang eranya bersih-bersih, APH harus cepat tanggap dan transparan dalam proses penindakan, sehingga tidak perlu ada demo mahasiswa dan masyarakat baru APH bertindak,"demikian ucap Petrus Selestinus.

Ia menegaskan bahwa DPRD Lembata harus berani menegur Kajari Lembata dan Kapolres Lembata jika mengabaikan desakan DPRD Lembata dan masyarakat untuk mengusut sampai tuntas kasus ini.

"Jaksa Agung dan Kapolri perlu beri atensi atas penindakan kasus korupsi dengan nilai Rp. 20,5 miliar tersebut,"tegasnya. (MI/Van).

**Petrus Selestinus: Gagalnya
Proyek Pembangunan Air Bersih
Wei Lain Dipastikan Telah
Memenuhi Unsur Tindak Pidana
Korupsi**



Kupang, mwartapedia.com – Tanggung jawab pidana atas gagalnya perencanaan proyek pembangunan sarana air bersih Wei Lain, Kecamatan Omesuri, Kabupaten Lembata, yang diakibatkan oleh penyalahgunaan APBD sebesar Rp. 20.5 miliar, yang mengakibatkan proyek gagal dikerjakan, dipastikan telah memenuhi unsur tindak pidana korupsi.

Hal ini disampaikan oleh Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) dan Advokat Peradi, Petrus Selestinus, S.H saat dihubungi tim media mwartapedia.com pada Sabtu (20/11/2021).

Petrus Selestinus kepada media ini mengatakan bahwa gagalnya proyek pembangunan air bersih Wei Lain yang meresahkan masyarakat dapat direspon oleh Aparat Penegak Hukum.

“Masalahnya sekarang bagaimana politikal wil Aparat Penegak Hukum (APH) merespons keresahan masyarakat Wei Lain, Omesuri, karena penderitaan dari kekuarangan air semakin tidak pasti kapan berakhir dan uang Rp. 20,5 miliar raup kemana tidak jelas siapa yang harus bertanggung jawab,”ungkapnya.

Pakar hukum Pidana ini menambahkan Kejaksaan Negeri Lembata dan Polres Lembata harus berkoordinasi agar segera mengungkap dugaan korupsi dimaksud siapapun yang terlibat.

“Sekarang eranya bersih-bersih, APH harus cepat tanggap dan transparan dalam proses penindakan, sehingga tidak perlu ada demo mahasiswa dan masyarakat baru APH bertindak,”demikian

ucap Petrus Selestinus.

Ia menegaskan bahwa DPRD Lembata harus berani menegur Kajari Lembata dan Kapolres Lembata jika mengabaikan desakan DPRD Lembata dan masyarakat untuk mengusut sampai tuntas kasus ini.

“Jaksa Agung dan Kapolri perlu beri atensi atas penindakan kasus korupsi dengan nilai Rp. 20,5 miliar tersebut,” tegasnya. (MI/Van).

Petrus Selestinus: Gagalnya Proyek Pembangunan Air Bersih Wei Lain Dipastikan Telah Memenuhi Unsur Tindak Pidana Korupsi



Kupang, mwartapedia.com – Tanggung jawab pidana atas gagalannya perencanaan proyek pembangunan sarana air bersih Wei Lain, Kecamatan Omesuri, Kabupaten Lembata, yang diakibatkan oleh penyalahgunaan APBD sebesar Rp. 20.5 miliar, yang

mengakibatkan proyek gagal dikerjakan, dipastikan telah memenuhi unsur tindak pidana korupsi.

Hal ini disampaikan oleh Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) dan Advokat Peradi, Petrus Selestinus, S.H saat dihubungi tim media mwartapedia.com pada Sabtu (20/11/2021).

Petrus Selestinus kepada media ini mengatakan bahwa gagalnya proyek pembangunan air bersih Wei Lain yang meresahkan masyarakat dapat direspon oleh Aparat Penegak Hukum.

“Masalahnya sekarang bagaimana politikal wil Aparat Penegak Hukum (APH) merespons keresahan masyarakat Wei Lain, Omesuri, karena penderitaan dari kekuarangan air semakin tidak pasti kapan berakhir dan uang Rp. 20,5 miliar raup kemana tidak jelas siapa yang harus bertanggung jawab,”ungkapnya.

Pakar hukum Pidana ini menambahkan Kejaksaan Negeri Lembata dan Polres Lembata harus berkoordinasi agar segera mengungkap dugaan korupsi dimaksud siapapun yang terlibat.

“Sekarang eranya bersih-bersih, APH harus cepat tanggap dan transparan dalam proses penindakan, sehingga tidak perlu ada demo mahasiswa dan masyarakat baru APH bertindak,”demikian ucap Petrus Selestinus.

Ia menegaskan bahwa DPRD Lembata harus berani.menegur Kajari Lembata dan Kapolres Lembata jika mengabaikan desakan DPRD Lembata dan masyarakat untuk.mengusut sampai tuntas kasus ini.

“Jaksa Agung dan Kapolri perlu beri atensi atas penindakan kasus korupsi dengan nilai Rp. 20,5 miliar tersebut,”tegasnya. (MI/Van).

Petrus Selestinus: Gagalnya Proyek Pembangunan Air Bersih Wei Lain Dipastikan Telah Memenuhi Unsur Tindak Pidana Korupsi



Kupang, mwartapedia.com – Tanggung jawab pidana atas gagalnya perencanaan proyek pembangunan sarana air bersih Wei Lain, Kecamatan Omesuri, Kabupaten Lembata, yang diakibatkan oleh penyalahgunaan APBD sebesar Rp. 20.5 miliar, yang mengakibatkan proyek gagal dikerjakan, dipastikan telah memenuhi unsur tindak pidana korupsi.

Hal ini disampaikan oleh Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) dan Advokat Peradi, Petrus Selestinus, S.H saat dihubungi tim media mwartapedia.com pada Sabtu (20/11/2021).

Petrus Selestinus kepada media ini mengatakan bahwa gagalnya proyek pembangunan air bersih Wei Lain yang meresahkan masyarakat dapat direspon oleh Aparat Penegak Hukum.

“Masalahnya sekarang bagaimana politikal wil Aparat Penegak Hukum (APH) merespons keresahan masyarakat Wei Lain, Omesuri, karena penderitaan dari kekuarangan air semakin tidak pasti kapan berakhir dan uang Rp. 20,5 miliar raup kemana tidak jelas siapa yang harus bertanggung jawab,”ungkapnya.

Pakar hukum Pidana ini menambahkan Kejaksaan Negeri Lembata dan Polres Lembata harus berkoordinasi agar segera mengungkap dugaan korupsi dimaksud siapapun yang terlibat.

“Sekarang eranya bersih-bersih, APH harus cepat tanggap dan transparan dalam proses penindakan, sehingga tidak perlu ada demo mahasiswa dan masyarakat baru APH bertindak,”demikian ucap Petrus Selestinus.

Ia menegaskan bahwa DPRD Lembata harus berani.menegur Kajari Lembata dan Kapolres Lembata jika mengabaikan desakan DPRD Lembata dan masyarakat untuk.mengusut sampai tuntas kasus ini.

“Jaksa Agung dan Kapolri perlu beri atensi atas penindakan kasus korupsi dengan nilai Rp. 20,5 miliar tersebut,”tegasnya. (MI/Van).